

## ABSTRAK

**Ayu Indah Paramita, NIM 190211040082:** *Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan Access Reform Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Pembimbing (I) Dr. Syaugi Mubarak, MA. dan Pembimbing (II) Dr. H. Zaki Mubarak, M. Fin., M.Si. Tesis, pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** *Access Reform*, Pembiayaan Syariah, Pelaku Usaha, Akses Permodalan, Covid-19.

Berbagai upaya pemerintah melalui kebijakan dan program untuk, salah satunya Program Reforma Agraria memiliki kegiatan yang disebut *access reform* yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria atau pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan. Pemberian akses permodalan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui kerjasama Lintas Sektor dengan lembaga perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan berbasis syariah sebagai mitra pendamping. Sehingga diharapkan pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Namun pada saat pendampingan tidak ada salah satupun dari pelaku usaha yang memilih pembiayaan syariah sebagai akses untuk penambahan modal usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta faktor penghambat pembiayaan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, sumber data yang didapat melalui Kantor Pertanahan dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Bank Kalsel Syariah dan pelaku usaha sebanyak 5 orang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi awal, wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penyelenggaraan akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga unsur *maqasid syariah*, dan menggunakan akad syariah sebagai produk pembiayaannya. *Kedua*, model pembiayaan yang diharapkan pelaku usaha yaitu model pembiayaan untuk keperluan produktif dengan sistem pembayaran setelah panen atau per enam bulan akad yang sesuai dengan pembiayaan ini yaitu menggunakan akad mudarabah dan akad salam paralel dengan menggunakan asuransi sebagai pengcover jika terjadi gagal panen. *Ketiga*, faktor penghambat pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan syariah yaitu pelaku usaha tidak ingin berhubungan dengan bank apapun, dalam pembiayaan hanya menerima barang pinjaman berupa uang, kemudahan prosedur pada lembaga lain, dan pelaku usaha malu melakukan pembiayaan.

## ABSTRAK

**Ayu Indah Paramita, NIM 190211040082:** *Access to Bank Kalsel Sharia Finance in the Access Reform Program in Hulu Sungai Tengah District.* Supervisor (I) Dr. Syaugi Mubarak, M.A. and Advisor (II) Dr. H. Zaki Mubarak, M. Fin., M.Si. Thesis, in the Postgraduate Islamic Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Keywords:** *Access Reform, Sharia Financing, Business People, Covid-19.*

Agrarian Reform Program is one of which various government policies and programmes were implemented to assist in restoring the people's economy during the COVID-19 Pandemic, which has an activity known as access reform, namely providing opportunities for access to capital and other assistance to Agrarian Reform subjects or business actors to increase their welfare and income. Cross-sector collaboration with Islamic banking institutions to provide Islamic-based financing as co-partners. Regarding capital access, the Land Office collaborates with Islamic banking institutions across sectors to provide Islamic -based financing as co-partners. This study aimed to determine the review of Islamic Economic Law on access to Islamic finance in access reform operations in Hulu Sungai Tengah Regency and the financing inhibiting factors; thus, business players can develop their enterprises while adhering to Islamic principles. However, at the time of mentoring, there is nothing wrong with business actors choosing sharia financing as access to additional business capital. This study was field research, which used qualitative empirical legal research and descriptive analysis. The data sources were obtained through the Land Office's Community Land Arrangement and Empowerment Section, Bank Kalsel Syariah. This research comprised 5 (five) business actors, and the data was collected using observation, preliminary interviews, and documents. The study's findings indicate that implementing access to Islamic financing reforms in Hulu Sungai Tengah Regency has not been effective. This conclusion was based on field findings the implementation of access to sharia financing in access reform activities in Hulu Sungai Tengah Regency is in accordance with sharia principles, maintains maqasid sharia elements, and uses sharia contracts as financing products. The second, the financing model expected by business actors is a financing model for productive purposes with a payment system after harvest or per six months. The contract that is in accordance with this financing is using a mudarabah contract and a parallel salam contract by using insurance as a cover in case of crop failure. The third, the inhibiting factors for business actors in accessing sharia financing are that business actors do not want to deal with any banks, in financing they only receive loan goods in the form of money, the ease of procedures in other institutions, and business actors are ashamed of doing financing.